



**Kementerian
Dalam Negeri**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

Dr. EKO PRASETYANTO P. P., S.Si., M.Si., MA

**KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA.

KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

- Pembina Utama Madya (IV/D)
- ekop31968@gmail.com
- 0812-8882-4832

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2018 Lemhannas RI PPRA LVII.
2. 2012 S3/ Doktor Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan fokus studi Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Perekonomian Daerah di Era Desentralisasi Fiskal.
3. 2006 S2/ MA in Community Development at Faculty of Social Sciences, La Trobe University, Australia.
4. 2000 S2/ M.Si. dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan fokus studi Disparitas (Kesenjangan) Antar Wilayah.
5. 1992 S1/S.Si. dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan fokus studi Land Use Planning in Rural Area.
6. 1987 SMA jurusan Fisika (A1) dari SMA Bopkri I Yogyakarta.
7. 1984 SMP dari SMPN 8 Yogyakarta.
8. 1981 SD dari SD Bopkri Demangan Yogyakarta.



Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA.

KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

RIWAYAT JABATAN

BerAKHLAK

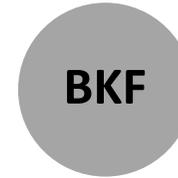
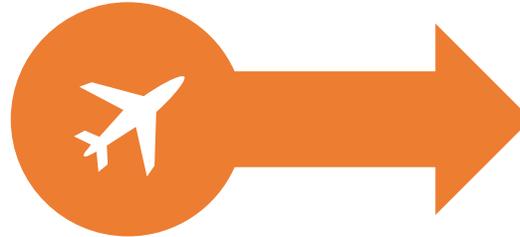
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

1. 2022 Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri.
2. 2021 Plh. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
3. 2020 Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa.
4. 2020 Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri.
5. 2015 Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri.
6. 2014 Direktur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kemendagri.
7. 2008 Kasubdit Penataan dan Pengembangan Desa, Direktorat Pemdes dan Kelurahan, Kemendagri.
8. 2007 Kepala Seksi Penataan Desa, Subdit Penataan dan Pengembangan Desa, Dit. Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kemendagri.
9. 2004 Kepala Seksi Penataan Kelembagaan, Subdit BPD, Dit. Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kemendagri.
10. 2003 Kepala Seksi Pelatihan, Subdit Pelatihan, Direktorat Pelatihan, Ditjen PMD, Kemendagri.
11. 2000 Kepala Seksi Administrasi Kelurahan, Subdit Administrasi Desa dan Kelurahan, Dit. Pemdes dan Kelurahan, Ditjen Pemdes dan Kelurahan, Ditjen PMD, Kemendagri



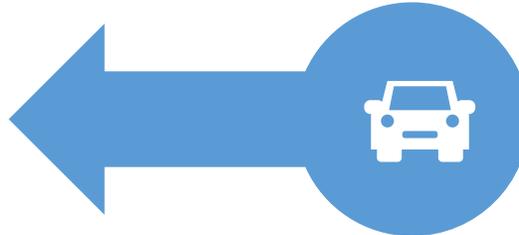
TRANSFORMASI LEMBAGA KELITBANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
LUAR NEGERI KEMENTERIAN
LUAR NEGERI



BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT



BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
DALAM NEGERI
(Perpres No 114 Tahun 2021)



BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI



TUGAS DAN FUNGSI BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI (Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri)

Tugas:

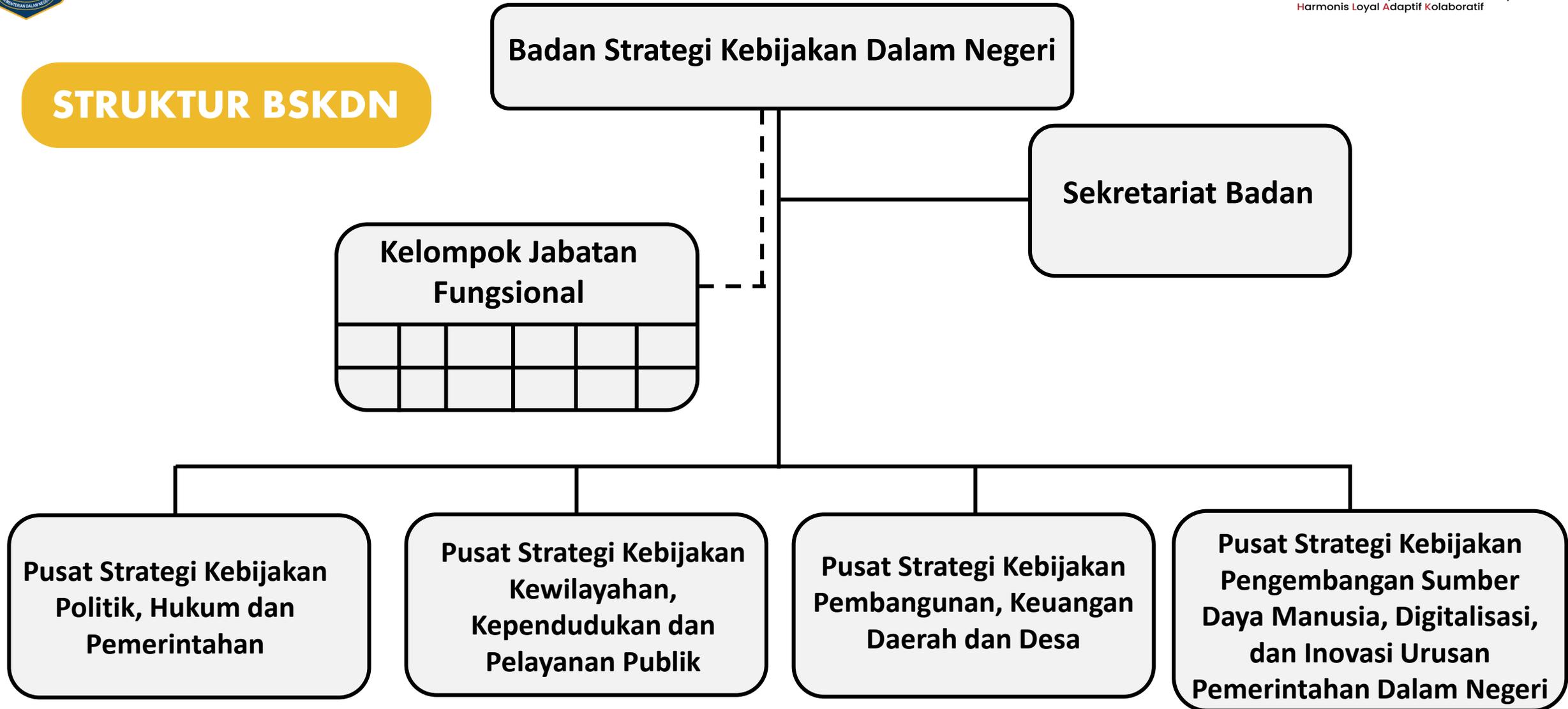
Menyelenggarakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.

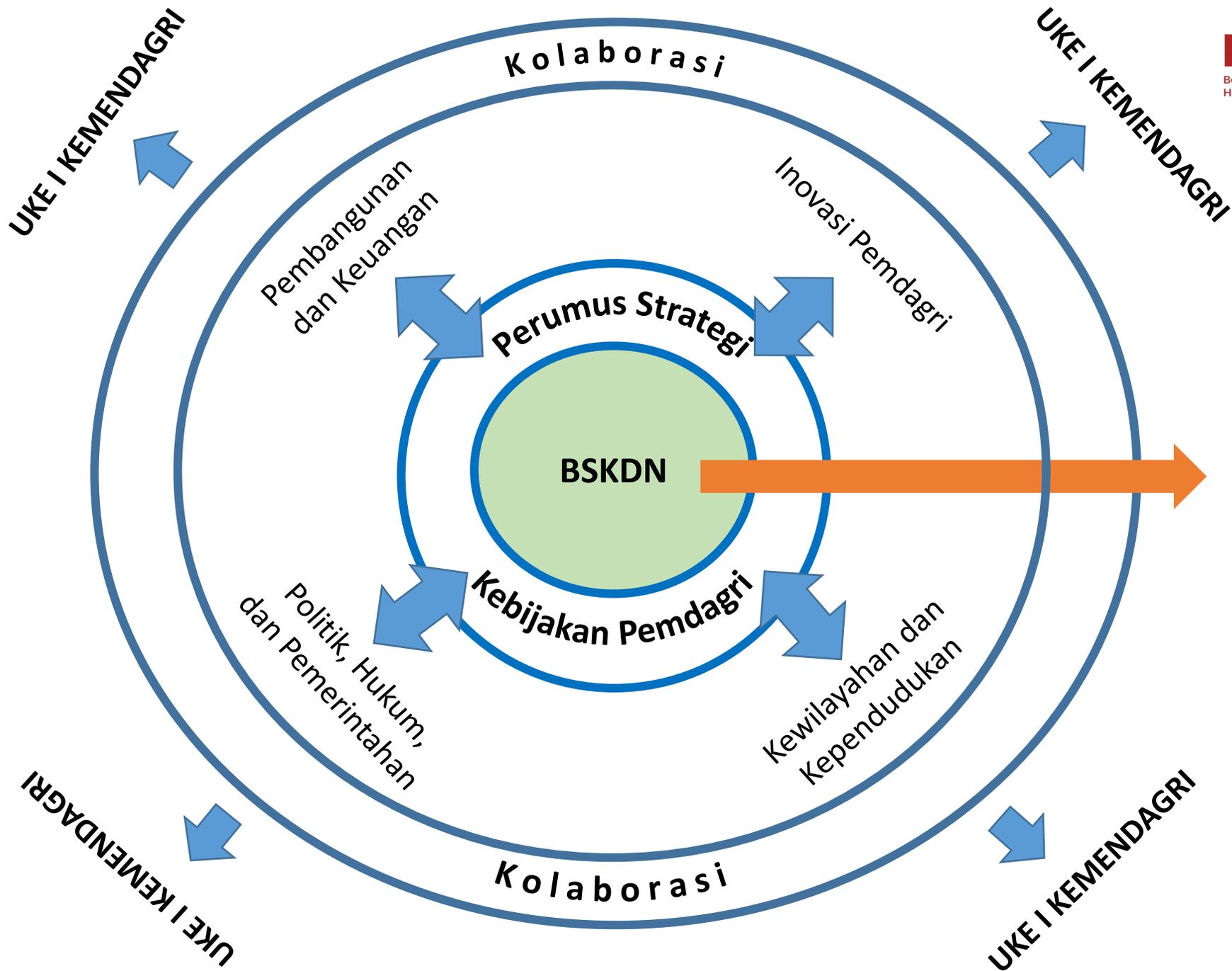
Fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



STRUKTUR BSKDN





Peran Sentral: **Perumus Rekomendasi Kebijakan Pemdagri**

- 1. Peran awal:** Perumus Strategi Kebijakan.
- 2. Peran Antara:** Kolaborator Strategi Kebijakan Bersama K/L dan UKE I Kemendagri.
- 3. Peran Akhir:** Evaluator Kebijakan.

1 INDEKS INOVASI DAERAH

PERMENDAGRI NO.104 TAHUN 2018

SISTIM PENGUKURAN & PENILAIAN TERHADAP PENERAPAN PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI SESUAI DENGAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

4 INDEKS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

SISTIM PENGUKURAN & PENILAIAN TERHADAP PENATAKELOAAN PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

2 INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERMENDAGRI NO.19 TAHUN 2020

SATUAN UKURAN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN SEPERANGKAT DIMENSI DAN INDIKATOR UNTUK MENILAI KINERJA TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL DALAM PERIODE TERTENTU YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

3 INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH

PERMENDAGRI NO.38 TAHUN 2020

MERUPAKAN SATUAN UKURAN YANG DITETAPKAN BERDASARKAN SEPERANGKAT VARIABEL, DIMENSI DAN INDIKATOR UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN DAN PENILAIAN TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH



**PEMBUKAAN UUD
1945 ALINEA KE-4
(EMPAT)**



Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Bangsa Indonesia



Memajukan kesejahteraan umum



Mencerdaskan Kehidupan Bangsa



Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

TUJUAN NEGARA AKAN TERCAPAI JIKA ?





Kepala daerah memiliki peran penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepemimpinan Kepala Daerah ikut serta dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:



**Tingkat Kemiskinan
Menurun**



**Tingkat Kesejahteraan
Masyarakat Meningkat**



**Tingkat Pendidikan
Masyarakat Meningkat**



**Tingkat Kesehatan
Masyarakat Meningkat**



“

Tujuan dilakukan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah diharapkan kepala daerah saling berlomba dan berinovasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kepemimpinan kepala daerah

”



TERIMA KASIH